

Pembuatan Pelayanan Digital Mandiri Desa (PDMD) Menuju Desa Digital Pada Desa Wanasalam

Tri Ferga Prasetyo, Ardi Mardiana, Aceng Jarkasih, Gerald Fatullah, Citra Pebrianti Fitria

Universitas Majalengka, Indonesia

*e-mail korespondensi: triferga.prasetyo@gmail.com

Abstract

The creation of the Independent Village Independent Digital Service PDMD is a form of the commitment of Majalengka University, which synergizes with the Wanasalam village, to implement this application with the aim of going to a Digital Village to simplify and speed up public services in local villages. In this service, the creation of Independent Village Independent Digital Services is adjusted to the needs of the community in the field of letter writing services. An innovative cover letter service program whose operation is webview-based which can be accessed in each community's device. People who wish to request a cover letter from the village can first access it at home on their respective mobile devices. Next, the printed results are requested for signatures and CAP to the Village Head. There are 29 types of correspondence services through this digital administrative PDMD. This is to prevent being used by irresponsible people such as brokers. It is also not complicated to wait for letters to be made, because residents only need to make them on their cellphones, after which authentic proof is carried out in the village.

Kata Kunci: *Services, Village, Correspondence, Majalengka University, Digital Services Independent Village.*

Abstrak

Pembuatan PDMD Pelayanan Digital Mandiri Desa Mandiri ini sebagai bentuk komitmen Universitas Majalengka yang bersinergi bersama desa wanasalam, dapat menerapkan aplikasi ini dengan bertujuan menuju Desa Digital untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan publik di desa setempat. Dalam pengabdian ini, pembuatan Pelayanan Digital Mandiri Desa Mandiri disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dalam bidang pelayanan pembuatan surat. Sebuah inovasi program pelayanan surat pengantar yang pengoperasiannya berbasis webview yang dapat diakses dalam gawai masing-masing masyarakat. Masyarakat yang hendak meminta surat pengantar dari desa, dapat diakses terlebih dahulu di rumah pada perangkat gawainya masing-masing. Selanjutnya, hasil print yang tercetak dimintakan tanda tangan dan CAP ke Kepala Desa. Terdapat 29 jenis pelayanan surat menyurat melalui PDMD administrasi secara digital ini. Hal ini untuk mencegah dimanfaatkan oleh orang yang tak bertanggung jawab seperti calo juga tidak ribet menunggu dalam pembuatan surat, karena warga cukup membuatnya di handphone masing-masing setelah itu bukti autentik dilakukan di desa tersebut.

Keywords: *Pelayanan, Desa, Surat Menyurat, Universitas Majalengka, Pelayanan Digital Desa Mandiri*

Accepted: 2023-07-11

Published: 2023-07-31

PENDAHULUAN

Sesuai dengan tujuan utama pembangunan desa berdasarkan Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa "membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab" serta Pasal 4 huruf f "Meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum". Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang bertujuan untuk "mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik" dan huruf b "terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik". Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah diberlakukan sejak tahun 2014, akan tetapi masih banyak ditemukan permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaannya terutama dalam hal

elayanan publik desa. Kurangnya koordinasi antara Kementerian Dalam Negeri RI dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, belum adanya peraturan teknis terkait pelayanan publik di desa, kurangnya partisipasi masyarakat, dan SDM yang tidak kompeten, berpotensi menimbulkan maladministrasi dalam tata kelola pelayanan publik desa. Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, banyak menerima laporan/pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan dalam pemerintahan desa, seperti yang berkaitan dengan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan. Bentuk-bentuk maladministrasi antara lain penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, penundaan berlarut, tidak kompeten, permintaan imbalan dan tidak memberikan layanan yang dilakukan oleh aparat desa. Pasal 8 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI menjelaskan bahwa "Ombudsman berwenang menyampaikan saran kepada Presiden, kepala daerah, atau Pimpinan Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik", maka Ombudsman RI mengadakan Own Motion Investigation (OMI) terkait implementasi dari perundangan yang berlaku dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa.

Oleh Karena itu dalam menyikapi kebijakan pemerintah pusat perlu adanya terobosan inovasi dalam pelayanan publik adalah pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, administrasi pertanahan dan administrasi kependudukan, perlu adanya beberapa dokumen yang harus disiapkan desa dalam menunjang kegiatan tersebut salah satunya memajukan SDM desa dan memanfaatkan teknologi di era industri 4.0 dengan pemanfaatan teknologi internet dan perangkat elektronik lainnya.

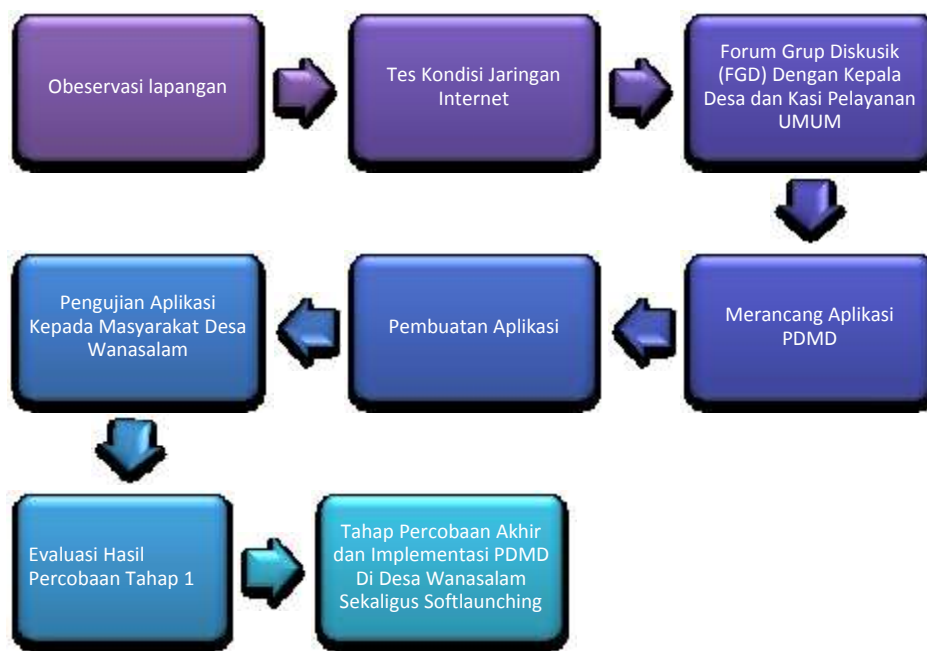
Pembuatan Pelayanan Digital Desa Mandiri (PDMD) salah satu solusi yang dapat dimanfaatkan desa yaitu Desa Wanasalam dalam mewujudkan pelayanan desa yang optimal dan terpadu dalam peningkatan PKD desa dalam masalah pelayanan publik. Dengan bantuan dan kolaborasi Universitas Majalengka (insan akademisi) Desa Wanasalam Kecamatan Ligung (pemerintah desa) yang mana dapat menciptakan pemberdayaan SDM desa dan pemanfaatan teknologi dalam pelayanan publik dapat memberikan kesiapan untuk pengembangan desa itu sendiri dalam hal pemanfaatan teknologi dalam hal pelayanan publik.

Adanya inovasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang optimal dan memperbaiki efisiensi waktu dalam pembuatan administrasi tersebut dan mengurangi efek ketidaknyamanan dalam pelayanan publik menamabah nilai desa dalam pelayanan publik yang disoroti oleh Ombudsman Republik Indonesia juga memberikan sebuah solusi dalam menjalankan RPJMD salah satunya Desa Wanasalam yang mana menginginkan Desa Digital dalam mendukung program Kabupaten Majalengka yaitu Pemberdayaan Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dalam membangun Majalengka Raharja.

METODE

Metode kegiatan dalam pengabdian ini yaitu menggunakan metode experimental dengan tahapan awal melakukan obeservasi lapangan pada Desa Wanasalam perangkat desa dan tes kondisi jaringan internet yang ada. Setelah proses pertama selesai tahap berikutnya proses FGD dengan kepala desa dan kasi pelayanan umum, setelah tahapan itu selesai tahapan berikutnya merancang aplikasi PDMD, pembuatan aplikasi, pengujian PDMD kepada masyarakat desa, evaluasi hasil percobaan tahap 1, tahap percobaan akhir dan implementasi PDMD di Desa Wanasalam sekaligus Soft Launcing Anjungan Pelayanan Mandiri Desa (PDMD).

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Wanasalam Kecamatan Palasah dengan melibatkan Warga Desa, yang memiliki dan perangkat desa Wanasalam. Metode pelaksanaan kegiatan PKM ini dilakukan dengan 8 tahapan yang secara rinci dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 1. Tahapan Metode Pengabdian Kepada Masyarakat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat menghabiskan waktu 2 Bulan yang terdiri dari Survei Lokasi, Izin Melakukan Pengabdian dan Proses Pembuatan adapun hasil pembuatan PDMD ini dijadikan program utama desa dalam pendekatan desa digital yang di gagas Kementrian Desa dalam meningkatkan pelayanan desa digital. Adapun kegiatannya di dokumentasikan dalam bentuk Video Dan photo-photo, pada saat implementasi aplikasi dihadiri oleh beberapa warga yang notabenenya Ibu ibu PKK dan ketua karang taruna serta perangkat desa yang dihadiri hampir semua hadir hanya saja kepala desa di wakili oleh sekeretaris desa atau biasa disebut pa ulis.





KESIMPULAN

Kesimpulan dalam Pengabdian ini Universitas Majalengka Bersinergi dalam membangun desa, dan mengimplementasikan literasi digital dan membangun desa digital, saran bagi pengabdian ini sebenarnya adalah pembuatan Anjungan Pelayanan Desa Mandiri tetapi Dana yang tersampaikan hanya cukup membuat aplikasi berbasis Mobile, kedepan LP2MI dan Tim Reviewer lebih Baik lagi dalam menelaah proposal penelitian dengan kesesuaian dana dan output yang hasil berbentuk ATM pelayanan yang cukup besar dalam pembuatannya yang dijadikan Teknologi Tepat Guna dalam program Universitas Majalengka Membangun Desa

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. (2017). Pentingnya Literasi Bagi Peningkatan Kualitas Pemuda. *Majalah Info*
 Anggraini, O., & Supriyanto, S. (2019). Literasi Digital. *Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019*, 117–126.

- Anwar. (2007). *Manajemen pemberdayaan perempuan: perubahan sosial melalui pembelajaran vocational skills pada keluarga nelayan*. Alfabeta.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet. (2019). Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia. In *Apjii*.
- Abdurahman, Dede, Prasetyo, Tri Ferga, 2018. Analisis Dan Perancangan E-Government Dalam Transparansi Sistem Pemerintahan Desa. *Majalengka. Mnemonic*, 1, 2, 1-13.
- Adisasmita, Rahardjo. 2013. Standar Pelayanan Publik. Jakarta.: Balai Pustaka.
- Agus Dwiyanto, dkk., Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah , Yogyakarta: PSKK-UGM, 2003.
- Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: a review of concepts. *Journal of Documentation*, 57(2), 218–259.
- Buchori, A. (2018). Pentingnya Literasi Digital Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Sosialisasi Pembangunan Melalui Media Sosial. *Omnicom Jurnal Ilmu Komunikasi Fikom Unsub*, 4(1), 11–16. Retrieved from <http://www.ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIKOM/article/view/531>
- Bastian, A., Susandi, D., Sujadi, H., Zaliluddin., Prasetyo, TF., Sopiandi, I., (2022). Pelatihan Cakap Bermedia Digital Di Kawasan Argapura Bumi Mandiri Jabar Digital Service Diskominfo Jabar. *Bernas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (3), 341-348.
- Depdikbud. (2003). Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. In *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Dwiyanto, Agus. 2012. Mewujudkan Good Governance Melayani Publik. Yogyakarta: UGM. Press.
- Gilster, P., & Glister, P. (1997). *Digital literacy*. Wiley Computer Pub. New York.
- Kaplan, A. M. (2015). Social media, the digital revolution, and the business of media. *International Journal on Media Management*, 17(4), 197–199.
- Hardiyansah. 2012. Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, zIndikator, dan Implementasinya. Yogyakarta. : Gaya Media.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68.
- Karwati, L. (2017). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan berbasis potensi alam setempat. *Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), 45–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.21009/JIV.1201.5>
- Kurnia, N., & Astuti, S. I. (2017). Peta gerakan literasi digital di Indonesia: studi tentang pelaku, ragam kegiatan, kelompok sasaran dan mitra. *Informasi*, 47(2), 149–166.
- KEPMENPAN Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Pedoman pelayanan Publik
- Kusdarini, Eny. 2012. Dasar-Dasar Hukum Adminstrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Yogyakarta : UNY Press.
- Prasetyo, TF., Sujadi, H., Herawan, Y. (2022). Seminar Workshop Literasi Digital Dan Digital Marketing Di Desa Sindangpanji Cikijing Majalengka. *Bernas : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 (4), 936-942.
- Rufaidah, E. (2017). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing. *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 361. <https://doi.org/10.32332/akademika.v22i2.824>
- Moenir, 2002. Manajemen Pelayanan Umum Indonesia. Jakarta ; Bumi Aksara.
- Setyaningsih, R., Abdullah, A., Prihantoro, E., & Hustinawaty, H. (2019). Model Penguatan Literasi Digital Melalui Pemanfaatan E-Learning. *Jurnal ASPIKOM*. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i6.333>
- Suryanti, S., & Wijayanti, L. (2019). Literasi Digital: Kompetensi Mendesak Pendidik Di Era Revolusi Industri 4.0. *EduStream: Jurnal Pendidikan Dasar*, 2(1), 1–9.

- Syafi'ie, Inu Kencana. 1999. Pengantar Ilmu Pemerintahan. Jakarta: PT. Pertja
- Thamrin, Husni, 2013, Hukum pelayanan Publik Di Indonesia, Yogyakarta ; Aswaja Pressindo
- Winarsih, E., & Furinawati, Y. (2018). Literasi Teknologi Dan Literasi Digital Untuk Menumbuhkan Keterampilan Berwirausaha Bagi Kelompok Pemuda Di Kota Madiun. *Prosiding Seminar Nasional & Internasional*, 1(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/EUM0000000007083> *SingkatKesejahteraanSosial*, 9(21), 9–12.
- Wahab, Solihin Abdul, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta:Bumi Aksara, 2014.